

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 dan implikasi hukum putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pilkada. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 ? 2) Bagaimana implikasi hukum putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pilkada ? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pertimbangan hukum yang menjadi dasar Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain, belum terbentuknya badan peradilan khusus yang ditunjuk oleh Presiden/Pemerintah dan DPR untuk menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah, adanya perubahan mendasar Pasal 157 dalam tiga perubahan UU Pilkada; sejarah perkembangan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pilkada di MK; tidak adanya lagi perbedaan rezim pemilihan baik pemilu maupun pilkada 2) Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 memberikan Mahkamah Konstitusi kewenangan permanen untuk menyelesaikan sengketa terkait hasil pilkada sehingga keputusan ini memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa Pilkada. Dengan demikian, Badan Peradilan Khusus secara tegas dilarang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hasil pilkada. Adapun rekomendasi penulis adalah pembentuk undang-undang hendaknya dapat merumuskan *ius constituendum* pengaturan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah yang ideal dengan mempertimbangkan banyak nya beban kerja Mahkamah Konstitusi sehingga dapat berimplikasi pada efektifitas dan efisisensi putusan yang dihasilkan.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Perselisihan Hasil, Pilkada,

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine and analyze the considerations of the Constitutional Court Judges in Decision Number 85/PUU-XX/2022 and the legal implications of Decision Number 85/PUU-XX/2022 on the special court for resolving disputes over regional election results. The issues addressed in this research are: 1) What are the considerations of the Constitutional Court Judges in Decision Number 85/PUU-XX/2022? 2) What are the legal implications of Decision Number 85/PUU-XX/2022 on the special court for resolving disputes over regional election results? The research method employed in this thesis is normative juridical. The results of the discussion in this study indicate that 1) The legal considerations underlying the Constitutional Court Decision include the absence of the establishment of a special court designated by the President/Government and the DPR to handle disputes over regional election results, the fundamental changes in Article 157 in three amendments to the Regional Election Law; the historical development of authority in resolving disputes over regional election results at the Constitutional Court; the elimination of the distinction between election regimes for both general elections and regional elections 2) The implications of Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022 grant the Constitutional Court permanent authority to resolve disputes related to regional election results, thereby expanding the Constitutional Court's authority in handling regional election disputes. Consequently, the Special Court is explicitly prohibited from resolving issues related to regional election results. The author's recommendation is that the legislator should formulate ideal legal provisions for resolving disputes over the results of Regional Head Elections, considering the heavy workload of the Constitutional Court, which can affect the effectiveness and efficiency of the decisions produced.

Keywords : Constitutional Court, Dispute of Results, Regional Elections